

Pengadilan Negeri Sibolga

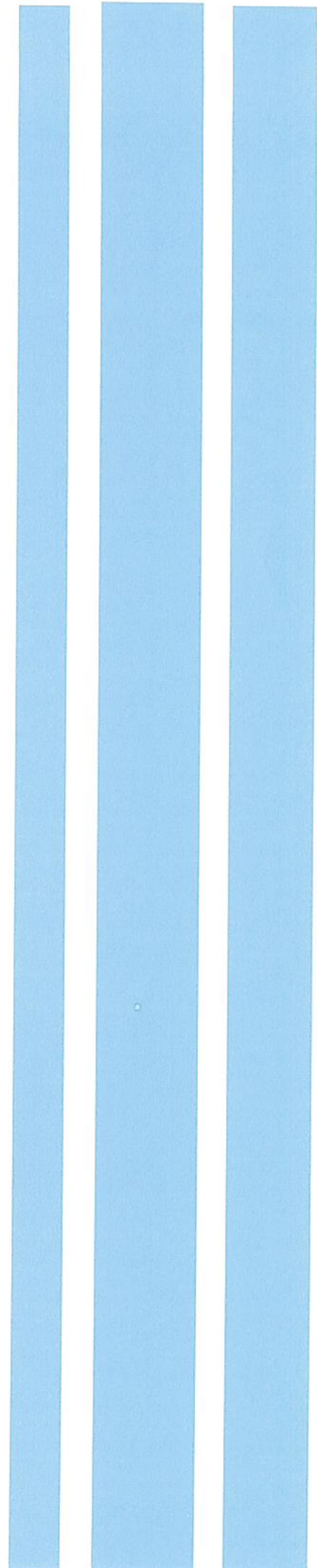
LAPORAN KEUANGAN

Semester I (099203)

Periode Tahun 2023

Jl.Padang Sidempuan No.6

Sibolga – Sumatera Utara



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pengadilan Negeri Sibolga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sibolga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sibolga, 31 Juli 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

Esron Ginting, SH
NIP. 197001251993031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	46

Pengadilan Negeri Sibolga

Jl. Padang Sidempuan No. 6 Kota Sibolga - Sumatera Utara
Telp/Fax. 0631 21572 e-mail : pnsibolga@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sibolga yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode Semester I 30 Juni 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sibolga, 31 Juli 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

Esron Ginting, SH
NIP. 197001251993031007



Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 25.299.500,- atau mencapai 68 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 37.240.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada periode Semester I TA 2023 adalah sebesar Rp. 73.822.500,- atau mencapai 48 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 154.300.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset pada 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 396.456.246,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 396.456.246,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 396.456.246,- dan Rp. 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 1 Januari - 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 25.299.500,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 76.627.472,-

sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 51.327.972,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (Rp.51,327,972,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 1 Januari 2023 adalah sebesar (Rp 2.045.000),- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 51.327.972),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesarRp. 53.372.972,- sehingga Ekuitas entitas pada 30 Juni 2023 adalah senilai Rp. 0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk 1 Januari – 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 099203

Tgl Data : 24/07/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 24/07/23 1:27 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	37.240.000	25.299.500	(11.940.500)	68	29.243.000	16.107.500	13.135.500	55
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	37.240.000	25.299.500	(11.940.500)	68	29.243.000	16.107.500	13.135.500	58
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	154.300.000	73.822.500	80.477.500	48	179.900.000	61.485.500	118.414.500	34
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 099203

Tgl Data : 24/07/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 24/07/23 1:27 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	154.300.000	73.822.500	80.477.500	48	179.900.000	61.485.500	118.414.500	34
C	PEMBIAYAAN				0				0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
NERACA
PER TAHUN 30 JUNI 2023

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 24/07/23 1:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan) -	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	386,456,246	0	386,456,246	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	396,456,246	0	396,456,246	
JUMLAH ASET	396,456,246	0	396,456,246	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	386,456,246	2,045,000	384,411,246	18,797.62
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	396,456,246	2,045,000	394,411,246	19,286.61
JUMLAH KEWAJIBAN	396,456,246	2,045,000	394,411,246	19,286.61
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	(2,045,000)	2,045,000	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	(2,045,000)	2,045,000	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	(2,045,000)	2,045,000	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	396,456,246	0	396,456,246	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2023

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 24/07/23 1:26 PM
Halaman : 1
lap_lo_salker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,299,500	16,107,500	9,192,000	57.067
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,299,500	16,107,500	9,192,000	57.067
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,299,500	16,107,500	9,192,000	57.067
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	29,374,472	19,969,500	9,404,972	47.097
Beban Barang dan Jasa	30,266,000	27,070,000	3,196,000	11.806
Beban Pemeliharaan	1,397,000	0	1,397,000	
Beban Perjalanan Dinas	15,590,000	12,390,000	3,200,000	25.827
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/23 6:00 AM
 Tgl Cetak : 24/07/23 1:26 PM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	76,627,472	59,429,500	17,197,972	28.938
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(51,327,972)	(43,322,000)	(8,005,972)	18.48
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(6,548,162)	6,548,162	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	6,548,162	(6,548,162)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(6,548,162)	6,548,162	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(51,327,972)	(49,870,162)	(1,457,810)	2.923
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(51,327,972)	(49,870,162)	(1,457,810)	2.923

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2023

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/23 12:00 PM
 Tgl Cetak : 24/07/23 1:27 PM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	(2.045,000)	(3.037,500)	992,500	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(51.327,972)	(49.870,162)	(1.457,810)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	53.372,972	51.926,162	1.446,810	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2.045,000	2.056,000	(11,000)	-
EKUITAS AKHIR	0	(981,500)	981,500	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Sibolga

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Pengadilan Negeri Sibolga adalah bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga.

Visi Pengadilan Negeri Sibolga adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA YANG AGUNG”**, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Sibolga menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Sibolga adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sibolga.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sibolga.
4. Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sibolga.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sibolga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Sibolga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Sibolga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	100%

	tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua lima juta

rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran

yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Sibolga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi dan adanya perubahan rencana penarikan pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1	2	3
PENDAPATAN	0	0
PENDAPATAN PNBP	37.240.000	37.240.000
JUMLAH PENDAPATAN	37.240.000	37.240.000
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	154.300.000	154.300.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	154.300.000	154.300.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan
Rp 25.299.500

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 25.299.500,- atau mencapai 68 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.37.240.000,-. Rincian pendapatan Pengadilan Negeri Sibolga dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	30 Juni 2023		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Anggaran
1	2	3	4
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan		30.000	
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.700.000	1.210.000	
Pendapatan Ongkos Perkara	7.445.000	7.240.000	
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	27.000.000	16.819.500	
Jumlah	37.240.000	25.299.500	

Realisasi Belanja
Negara Rp.
73.822.500,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 73.822.500,- atau 48% dari anggaran belanja sebesar Rp. 154.300.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode yang berakhir 30 Juni 2023

URAIAN	TA periode yang berakhir 30 Juni 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
1	2	3	4
Belanja Pegawai	0	0	%
Belanja Barang	154.300.000	73.822.500	48%
Belanja Modal	0	0	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00%
Total Belanja Kotor	154.300.000	73.822.500	48%
Pengembalian	0	0	0,00%
Jumlah	154.300.000	73.822.500	48%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp.
0,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022

Uraian	TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023	TA 2022 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022
Belanja Gaji dan Tunj.PNS	0	0
Belanja Uang Makan	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0
Total Belanja Kotor	0	0
Pengembalian	0	0
Jumlah	0	0

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp
73.822.500,-

Realisasi Belanja Barang TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 73.822.500,- dan Rp. 61.485.500 ,-

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022

Uraian	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022
Belanja Barang Operasional	83.590.000	81.960.000
Belanja Barang Non Operasional	31.200.000	31.200.000
Belanja Jasa	0	0
Belanja Pemeliharaan	0	0

Belanja Perjalanan Dinas	39.510.000	66.740.000
Total Belanja Kotor	39.510.000	66.740.000
Pengembalian Belanja	0	0
Jumlah	154.300.000	1.473.548.000

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022

Uraian	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja jalan,Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja	-	-
Jumlah Belanja	0	0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Hal ini Belanja Modal Tanah tidak ada di anggarkan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022

Uraian Jenis Belanja	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-
B.Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-

Belanja Modal Pembuatan Serifikat Tanah	-	-
Belanja Modal Pengukuran Tanah	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022

Uraian Jenis Belanja	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022
Pengadaan Komputer unit/Laptop	0	0
Peralatan Komputer	0	0
Pengadaan meubilier	0	0
Biaya Honor Tim Pengadaan	0	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	0	0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 tidak ada di anggarkan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang
berakhir 30 Juni 2022*

Uraian Jenis Belanja	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022
Gedung Tempat kerja	-	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	-	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022

Uraian Jenis Belanja	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023	TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022
Belanja Modal Jaringan	-	-
B.Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	0	0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan TA 2022 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 Nihil. Hal ini disebabkan karena tidak ada di anggarkan di TA 2023 dan TA 2022

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 10.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Periode Semester I per tanggal 30 Juni 2023 Rp.10.000.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Uang Tunai	10.000.000	0
Kwitansi UP	0	0
Bank BRI Cab.Sibolga	0	0
Jumlah Belanja	10.000.000	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Periode Semester 1 per tanggal 30 Juni Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Cab.Sibolga	-	-
Jumlah Belanja	-	-

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Periode Semester 1 per tanggal 30 Juni Tahun 2023 sebesar Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Perpajakan
Rp0,-

dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	30 Juni 2023	31 Desember 2022
Kas Lain d Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lain d Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNBP

Piutang PNBP Rp0,-

Saldo Piutang PNBP Periode Semester 1 per tanggal 30 Juni Tahun 2023 sebesar Rp0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Nama	30 Juni 2023	31 Desember 2022
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA
Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 dan masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Nama	30 Juni 2023	31 Desember 2022
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	-	-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp0,-

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 31 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Nama	31 Juni 2023	31 Desember 2022
1	Belanja Gaji Pokok PNS	-	-
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-
3	Belanja Tunj.Suami/Isteri PNS	-	-
4	Belanja Tunj.Anak PNS	-	-
	Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Juni 2023
dan 31 Desember 2022*

No	Jenis	31 Juni 2023	31 Desember 2022
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP Per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Debitur	30 Juni 2023	31 Desember 2022
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
Jumlah		-	-

Tagihan Penjualan
 Angsuran
 Rp0,-

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2023

No	Debitur	30 Juni 2023	31 Desember 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
 Tak Tertagih –
 Piutang Jangka
 Panjang
 Rp0,-

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
 Per 30 Juni 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	-	-

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Negeri Sibolga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Tidak ada mengalami Mutasi Tambah ataupun Kurang. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanah
Rp. 0,-

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	0
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Penyitaan Pengadilan	-
Saldo per 30 Juni 2023	0

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin
Rp. 0,-

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1.494.941.423
Mutasi Tambah	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Hibah Barang	-
Penggunaan Kembali	-
Mutasi Kurang	-
Penghentian dari Pengguna	-
Saldo per 30 Juni 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2023	-

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Gedung dan
Bangunan
Rp.0,-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2022	4.899.492.000
Mutasi Tambah	-
Pembelian/Pembangunan	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-

Nilai Buku per 30 Juni 2023	-
-----------------------------	---

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.0,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	99.385.000
Mutasi Tambah	0
Penambahan Jaringan Listrik	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp. 0,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0,- dan Rp. 0,-. Aset tetap tersebut berupa Bahan Perpustakaan Tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.474.751
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 31 Juni 2023	0

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,-

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-, untuk per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 ini tidak ada pengerjaan Pembangunan Gedung Kantor.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp0,-

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
0	Jumlah	0	0	0

Aset Tak Berwujud
Rp0,-

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Negeri tebing Tinggi berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		-
Mutasi Tambah		-
		-
Mutasi Kurang		-
		-
Saldo per 30 Juni 2023		-
Akumulasi Penyusutan		-

Nilai Buku per 30 Juni 2023	-
-----------------------------	---

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp. 0,-

Saldo Aset Lain-lain) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2022	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2023	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	0

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp.0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Aset Tak Berwujud	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN

Rp.10.000.000,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak

Ketiga

Rp 386.456.246,-

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 386.456.246,- dan Rp. 2.045.000,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Negeri Sibolga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.25 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima
di Muka

Rp0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Sampai pelaporan ini dibuat Pendapatan Diterima Dimuka Nilainya Nihil.

Rincian Pendapatan diterima dimuka

Uraian	Jumlah
Nihil	-
	-
	-
Total	-

Beban Yang Masih

Harus Dibayar Rp0,-

C.26 Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban Yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2021	31 Des 2020
Nihil	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.27 Ekuitas

Ekuitas

Rp 16.726.655.430,-

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan (Rp. 2.045.000,-) Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB

Rp 25.299.500,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 25.299.500,- dan Rp 16.107.500,-
Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	30 Juni 2023
1	2
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.210.000
Pendapatan Ongkos Perkara	7.240.000
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	16.819.500
Jumlah	25.299.500

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai pada 30 Juni 2023

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2023
1	Beban Gaji dan Tunj.PNS	0
2	Beban Uang Makan PNS	0
3	Beban Lembur	0
4	Beban Tunj.Khusus & Beban Pegawai Transito	0
Jumlah		0

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp
29.374.472,-

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 29.374.472,- dan Rp 19.969.500,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
1	Beban Persediaan Konsumsi	29.374.472	19.969.500	47%
2	Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
3	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan Leges	-	-	-
4	Beban Persediaan Barang Hasil Sitaan	-	-	-
5	Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		29.374.472	19.969.500	47%

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp. 30.266.000,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 30.266.000,- dan Rp 27.070.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp. 1.397.000,-

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.397.000,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena Besarnya Reliasasi pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas Rp 15.590.000,-

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 15.590.000,- dan Rp 12.390.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial
Rp0,-

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp 0,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp.0,-

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 31 Desember adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 31 Desember

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)%
1	Penerimaan kembali Belanja Pegawai	0	0	00.00
2	Penjualan Alat Kantor	0	0	00.00
3	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	00.00
4	Pendapatan dari kegiatan non operasional	0	0	00.00
5	Beban dari kegiatan non operasional	0	0	00.00
Jumlah		0	0	00.00

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. (Rp.
2.045.000),-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp. 2.045.000),- dan (Rp. 3.037.500,-)

Defisit LO
Rp. (51.327.972,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (51.327.972,-) dan Rp. (49.870.162,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0,-.

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan

karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp 0,-

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp 53.372.972,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 53.372.972,- dan Rp 51.926.162,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Tahun 2021 Unaudited DDEL sebesar Rp (7,231.125) sedangkan Tahun 2021 Unaudited DKEL sebesar 5.140.681.356,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2023 Rp0,- terdiri dari:

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	o	o
2	Persediaan	o	o

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal sebesar Rp0,- yang merupakan transfer Persediaan kepada Deputi Sistem dan Peraturan

Akuntansi.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima per 30 Juni 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0.

Ekuitas Akhir Rp. 0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. (981.500),-.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal berakhirnya 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 sampai Pelaporan Calk terdapat Kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca. Yakni :

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Tidak terdapat temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK untuk laporan keuangan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 .

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional lingkup Pengadilan Negeri Sibolga sampai dengan Tahun 2021 Audited sebanyak 3 rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran : 2 rekening
2. Rekening Pemerintah Lainnya : 1 rekening

Jumlah : 3 rekening

Daftar rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Pemerintah Lainnya berupa rekening biaya perkara serta monitoring penutupan rekening per 31 2021 Unaudited terlampir dalam Laporan Pendukung.

F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. REVISI DIPA

Hingga Berakhirnya periode 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 hal Revisi Dipa 01 Pengadilan Negeri Sibolga terlaksana sebanyak 3 kali revisi baik revisi halaman 3 DIPA .

b. RALAT SPM,SSBP dan SSPB

Sampai berakhirnya periode 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 tidak terdapat ralat SPM .

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 099203

Tgl Data : 24/07/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 24/07/23 1:27 PM
Halaman : 1
lap_tra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	37.240.000	25.299.500	(11.940.500)	68	29.243.000	16.107.500	13.135.500	55
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	37.240.000	25.299.500	(11.940.500)	68	29.243.000	16.107.500	13.135.500	68
B.	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	154.300.000	73.822.500	80.477.500	48	179.900.000	61.485.500	118.414.500	34
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 099203

Tgl Data : 24/07/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 24/07/23 1:27 PM
Halaman : 2
lap_tra_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B1 + B II)	154.300.000	73.822.500	80.477.500	48	179.900.000	61.485.500	118.414.500	34
C.	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/23 12:00 PM
 Tgl Cetak : 24/07/23 1:27 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_salker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	386,456,246	0	386,456,246	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	396,456,246	0	396,456,246	
JUMLAH ASET	396,456,246	0	396,456,246	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	386,456,246	2,045,000	384,411,246	18,797.62
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	396,456,246	2,045,000	394,411,246	19,286.61
JUMLAH KEWAJIBAN	396,456,246	2,045,000	394,411,246	19,286.61
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	(2,045,000)	2,045,000	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	(2,045,000)	2,045,000	(100.00)
JUMLAH EKUITAS	0	(2,045,000)	2,045,000	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	396,456,246	0	396,456,246	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/07/23 1:26 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,299,500	16,107,500	9,192,000	57.067
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,299,500	16,107,500	9,192,000	57.067
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,299,500	16,107,500	9,192,000	57.067
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	29,374,472	19,969,500	9,404,972	47.097
Beban Barang dan Jasa	30,266,000	27,070,000	3,196,000	11.806
Beban Pemeliharaan	1,397,000	0	1,397,000	
Beban Perjalanan Dinas	15,590,000	12,390,000	3,200,000	25.827
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/07/23 1:26 PM

Halaman : 2

lap_lo_salker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	76,627,472	59,429,500	17,197,972	28.938
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(51,327,972)	(43,322,000)	(8,005,972)	18.48
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(6,548,162)	6,548,162	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	6,548,162	(6,548,162)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(6,548,162)	6,548,162	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(51,327,972)	(49,870,162)	(1,457,810)	2.923
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(51,327,972)	(49,870,162)	(1,457,810)	2.923

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 24/07/23 1:27 PM

Halaman : 1

lap_lpe_salker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	(2.045.000)	(3.037.500)	992.500	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(51.327.972)	(49.870.162)	(1.457.810)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	53.372.972	51.926.162	1.446.810	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2.045.000	2.056.000	(11.000)	-
EKUITAS AKHIR	0	(981.500)	981.500	-